

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan yang terutang kepada wajib pajak. Mengacu pada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 073 Tahun 2019 tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi serta tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung bahwa UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Bandung Tengah memiliki tugas dan kewenangan dalam menerima, meneliti, dan menerbitkan keputusan terkait permohonan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Pendistribusian yang dimaksud adalah proses atau kegiatan penyaluran surat sampai kepada masyarakat yang bersangkutan sedangkan penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat John Hutagaol (2007:325).

Menurut Muhammad Muslinudin, Oktafianto (2016), "Sistem adalah sekumpulan komponen atau jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berkaitan dan saling bekerja sama membentuk suatu jaringan kerja untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Sistem yang baik dapat mempengaruhi proses penerimaan surat tagihan". Oleh sebab itu sistem pendistribusian SPPT dan penerimaan PBB harus diterapkan dengan baik dan sesuai.

Sistem Pendistribusian SPPT dan penerimaan PBB termasuk hal yang sangat penting dalam keberlangsungan penerimaan pendapatan pajak daerah. Dalam sistem pendistribusian SPPT dan penerimaan PBB, terdapat beberapa komponen atau unsur yang saling berkaitan diantaranya kebijakan pendistribusian, catatan dan dokumen yang diperlukan, fungsi-fungsi, serta sistem pengendalian internal yang mengontrol kegiatan pendistribusian dan penerimaan. Sistem pendistribusian SPPT dan penerimaan PBB yang terbilang baik adalah saat sistem pengendalian internal mampu meminimalisir risiko yang ada. Terdapat beberapa kriteria atau faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian internal yang baik seperti karyawan yang mampu dan dapat dipercaya, tugas pertanggungjawaban, memberikan kekuasaan atau otorisasi yang tepat, serta pemisahan tugas untuk meminimalisir terjadinya kesalahan.

Sistem pendistribusian dan penerimaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Wilayah Bandung Tengah menggunakan kebijakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 073 Tahun 2019 pasal 45 yang mengatur tentang PAD 2. SPPT PBB yang didistribusikan oleh pihak UPT PPD Wilayah Bandung Tengah terhitung sebesar 97.552 pada tahun 2020. Penerimaan yang ditargetkan sebesar Rp110.051.006.300,00; sedangkan realisasinya sebesar Rp113.050.616.630,00;. Karena itu pendistribusian SPPT PBB masih sangat berpengaruh terhadap penerimaan PBB di UPT PPD Wilayah Bandung Tengah. Sistem

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbandingkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

pengendalian internal pada UPT PPD wilayah Bandung Tengah pun terbilang belum baik, karena dalam kegiatannya masih terdapat karyawan yang masih memiliki tugas merangkap dan belum memiliki *software* tersendiri untuk menyimpan atau memproses data penting.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas sistem pendistribusian SPPT yang ada pada UPT Pengelolaan Pendapatan Wilayah Bandung Tengah dalam bentuk laporan tugas akhir dengan judul “Sistem Pendistribusian SPPT dan Penerimaan PBB di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Bandung Tengah”.

2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan, maka rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan Sistem Pendistribusian SPPT dan Penerimaan PBB UPT PPD Wilayah Bandung Tengah?
2. Apa saja fungsi yang terkait dalam sistem pendistribusian SPPT dan penerimaan PBB di UPT PPD Wilayah Bandung Tengah?
3. Apa saja dokumen dan catatan yang diperlukan dalam sistem pendistribusian SPPT dan penerimaan PBB di UPT PPD Wilayah Bandung Tengah?
4. Bagaimana jaringan prosedur dan bagan alir yang terdapat dalam Sistem Pendistribusian SPPT dan Penerimaan PBB di UPT PPD Wilayah Bandung Tengah?
5. Bagaimana sistem pengendalian internal yang diterapkan pada Sistem Pendistribusian SPPT dan Penerimaan PBB di UPT PPD Wilayah Bandung Tengah?

1.3 Tujuan

Tujuan penulis dalam menyusun laporan tugas akhir dalam mengambil topik Sistem Pendistribusian SPPT dan Penerimaan PBB di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Bandung Tengah adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan kebijakan Sistem Pendistribusian SPPT dan Penerimaan PBB di UPT PPD Wilayah Bandung Tengah.
2. Menguraikan fungsi yang terkait dalam sistem pendistribusian SPPT dan penerimaan PBB di UPT PPD Wilayah Bandung Tengah.
3. Menguraikan dokumen dan catatan dalam Sistem Pendistribusian SPPT dan Penerimaan PBB di UPT PPD Wilayah Bandung Tengah.
4. Menguraikan jaringan prosedur dan bagan alir yang terdapat dalam Sistem Pendistribusian SPPT dan Penerimaan PBB di UPT PPD Wilayah Bandung Tengah.
5. Menguraikan sistem pengendalian internal yang diterapkan pada Sistem



Pendistribusian SPPT dan Penerimaan PBB di UPT PPD Wilayah Bandung Tengah.

1.4 Manfaat

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)
 Manfaat yang diharapkan penulis antara lain diantaranya:

1. Bagi penulis
Laporan ini meningkatkan pengetahuan maupun wawasan dan pengalaman lapangan kepada penulis mengenai Sistem Pendistribusian SPPT dan Penerimaan PBB.
2. Bagi Instansi
Sebagai referensi atau masukan untuk UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Bandung Tengah dalam mengevaluasi dan pengambilan keputusan.
3. Bagi pembaca
Sebagai referensi untuk laporan akhir selanjutnya yang berkaitan dengan Sistem Pendistribusian SPPT dan Penerimaan PBB serta memberikan pengetahuan dan wawasan kepada pembaca.



Sekolah Vokasi
 College of Vocational Studies

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Sistem

Sistem menurut McLeod dalam bukunya yang berjudul “*Management Information System*” adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai tujuan (McLeod, 2014).

Sistem adalah sekumpulan elemen yang terintegasi dan bekerja bersama guna mencapai suatu tujuan tertentu. Suatu sistem mempunyai ciri-ciri karakteristik yang terdapat pada sekumpulan elemen yang harus dipahami dalam mengidentifikasi pembuatan sistem. Adapun karakteristik sistem yang dimaksud adalah sebagai berikut (Hutahaean, 2015) :

Komponen

Sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk membentuk satu kesatuan. Komponen sistem dapat berupa sub sistem atau bagian-bagian dari sistem.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritir atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.